



KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN
SCAN BARCODE



JUMAT LEGI

1 DESEMBER 2023 (17 JUMADILAWAL 1957 / TAHUN LXXIX NO 65)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN



BANJIR DI JAKARTA: Seorang warga menggondong anak saat banjir yang merendam rumah di Kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Kamis (30/11/2023). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan, total wilayah yang tergenang bertambah menjadi 69 RT dari sebelumnya 45 RT, dengan jumlah sementara pengungsi satu orang di Bidaracina.

2023 KPAI Terima 37 Aduan Miris, Kasus Bunuh Diri Anak Terus Meningkatkan

YOGYA (KR) - Bangsa ini tidak bisa membiarkan dan menganggap sederhana kasus bunuh diri pada anak. Selama 2023 sejak Januari hingga November, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terjadi 37 aduan kasus bunuh diri anak di Indonesia. Mirisnya, angka anak mengakhiri hidup sendiri karena pelbagai sebab dan dengan pelbagai cara, terus meningkat.

“Kasus tersebut terjadi pada usia rawan (Kelas 5-6 SD), Kelas 1 atau 2 SMP, Kelas 1 atau 2 SMA,” sebut Anggota KPAI Diyah Puspitasari kepada media, Kamis (30/11). Hasil penelitian yang dilakukan, sebut Diyah, anak di bawah usia 18 tahun melakukan bunuh diri karena pengasuhan, *bullying*, asmara, kekerasan seksual dan agresivitas. Perlu dipahami, lanjutnya, setiap motif tidak berdiri tunggal.

Diyah mengungkap, sangat mungkin angka sejatinya kasus bunuh diri pada anak ini lebih tinggi. Mengingat masih ada stigma negatif bagi keluarga yang anaknya bunuh diri, sebagian keluarga meyakini hal tersebut sebagai takdir dan keluarga bingung mau melaporkan ke mana, karena korban sudah meninggal. “Angka yang tampak dalam kasus bunuh diri anak ini juga merupakan fenomena gunung es,” tambahnya.

Dikatakan, pikiran atau tindakan untuk mengakhiri hidup, bahkan pada anak-anak yang masih sangat kecil, merupakan tanda stres yang ekstrem dan tidak boleh diabaikan. “Yang miris, seperti ada periodisasi. Pada periode tertentu anak-anak ini bunuh diri dengan melompat dari ketinggian. Dari 32 kasus, terdapat 6 kasus di antaranya terjun dari ketinggian. Kemudian periode lain, anak-anak yang bunuh diri dengan meninggalkan wasiat,” jelas Diyah.

Negara, menurutnya, tidak bisa membiarkan fenomena ini terus terjadi. Negara menurut, Diyah, harus mencari apa sesungguhnya akar persoalan ini. Dalam hal ini menurut Anggota KPAI, negara harus *cawe-cawe* serius, agar persoalan bunuh diri anak tidak menjadi persoalan yang berkembang di masyarakat.

Dikemukakan, perilaku menyakitkan diri sendiri, upaya serta keinginan mengakhiri hidup merupakan masalah kesehatan * **Bersambung hal 7 kol 1**

HARI INI DIPERIKSA PENYIDIK POLDA

Firli Bisa Dipenjara Seumur Hidup

JAKARTA (KR) - Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri tidak punya alasan untuk mangkir dari panggilan penyidik sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Jumat (1/12) hari ini. Apalagi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda

Metro Jaya sudah menerbitkan permohonan pengekangan ke luar negeri terhadap Firli kepada Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

“Dengan posisi nonaktif, apalagi KPK sudah menyatakan bahwa akses ke KPK diputus dan tidak lagi dilibatkan dalam tugas KPK, maka

sudah tidak ada lagi alasan bagi Firli untuk mangkir,” kata aktivis antikorupsi Yudi Purnomo dihubsungi di Jakarta, Kamis (30/11).

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu berpendapat sikap kooperatif tanpa mangkir dari Firli Bahuri merupakan wujud kepatuhan * **Bersambung hal 7 kol 1**

KPU FASILITASI CAPRES-CAWAPRES Bertemu Bappenas Siapkan Materi Debat

JAKARTA (KR) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan, calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) difasilitasi untuk bertemu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kebijakan itu, untuk membantu pasangan calon (paslon) dalam mempersiapkan materi visi dan misi terkait dengan kemampuan anggaran dana penyelenggaraan negara, sehingga informasi yang mereka sampaikan kepada masyarakat valid sesuai data terkini.

“Visi dan misi kemudian di-breakdown (perincian) ke dalam program itu. Hal ini berkaitan dengan anggaran negara. Oleh karena itu, penting ketika ingin menyusun rencana 5 tahun ke depan itu *kan* berdasarkan ketersediaan anggaran negara (APBN),” ungkap Hasyim di Kantor KPU, Kamis (30/11).

Hasyim menjelaskan, KPU sudah bertemu tim dari masing-masing paslon, kemudian pihaknya menyampaikan hal tersebut. Dengan demikian, jadwal pertemuan dengan Bappenas segera diatur. Selain Bappenas, KPU juga memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian Keuangan untuk membahas hal yang sama guna memperkaya informasi bagi paslon dalam menyusun target dalam 5 tahun ke depan.

* **Bersambung hal 7 kol 5**

UNTUK KEBUTUHAN PENYIDIKAN

Wamenkumham Dicegah ke Luar Negeri

JAKARTA (KR) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan cegah ke luar negeri terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej untuk kebutuhan penyidikan. Pencegahan agar tidak bepergian keluar negeri tersebut berlaku selama enam bulan sejak tanggal 29 November 2023.

“KPK pada Rabu (29/11) telah mengajukan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk mencegah agar tidak bepergian keluar negeri terhadap empat orang, di antaranya Wamenkumham, pengacara dan pihak swasta,” kata Kepala Bagian Pembe-



KR-Antara/Asprilla Dwi Adha
Edward Omar Sharif Hiariej

ritaun KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (30/11).

Ali menerangkan, cegah dilakukan agar para pihak tersebut tetap berada di dalam negeri ketika kete-

rangnya dibutuhkan pada proses penyidikan. “Kami sampaikan kembali, bahwa penyidikan dugaan korupsi di Wamenkumham tersebut sudah ditetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Namun identitasnya akan kami sampaikan secara resmi pada saat penahanan para tersangka,” ujarnya.

Sebelumnya KPK telah menandatangani surat penetapan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap. “Penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami * **Bersambung hal 7 kol 5**

KOMINFO, BSSN DAN KPU

Cek Dugaan Kebocoran Data Pemilih

JAKARTA (KR) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait temuan dugaan kebocoran data Pemilu 2024. Pihaknya masih memantau perkembangan terkini soal informasi dugaan kebocoran data di situs KPU.

Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong masih telusuri dan koordinasi bersama BSSN dan KPU. Langkah yang sama juga dilakukan KPU sebagaimana di tegaskan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Tim teknis KPU sedang melihat sejauh apa kebocoran data yang diduga terjadi sejak, Selasa (28/11).

“Tim yang menangani IT (teknologi informasi) KPU ada tim dari Siber Mabes Polri. Nanti, kalau sudah ada perkembangan, sudah jelas, tentu ada tindakan-tindakan lanjutan. Tetapi yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek,” kata Hasyim di Jakarta, Kamis, (30/11).

Ia menjelaskan awalnya tim KPU baru mengetahui informasi terkait kebocoran data tersebut melalui berita di media massa. Hasyim mengatakan, ada pihak yang menyampaikan ke publik mengenai sistem * **Bersambung hal 7 kol 1**

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:31	14:55	17:47	19:02	03:49

Jumat, 1 Desember 2023 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

KORUPSI DANA NASABAH RP 3,4 M

Hendak Nikahkan Anak, Tersangka Menyerahkan Diri

YOGYA (KR) - Hendak menikahkan anaknya, TM mantan kasir BUKP Pandak menyerahkan diri setelah menjadi DPO dalam dugaan kasus korupsi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan BUKP Kapanewon Pandak Tahun 2009-2019. Dalam perkara itu, tersangka diduga korupsi sebesar Rp 3.400.487.838.

Asisten Tindak Pidana Korupsi (Aspidus) Kejati DIY Muhammad Anshar Wahyuddin SH MH mengungkapkan, tersangka ini merupakan pemegang kas/kasir pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Tersangka sempat menjadi DPO karena dipanggil tidak pernah datang. “Tersangka sempat melarikan diri ke luar kota. Namun akhirnya tersangka menyerahkan diri karena akan menikahkan anaknya,” ungkapnya, Kamis (30/11).

Menurut Anshar, modulusnya yaitu mengambil kas di Bank Bantul tanpa sepengetahuan Kepala BUKP. Selain itu penyalahgunaan pengelolaan dana pihak ketiga yang

terdiri dari tabungan dan deposito berupa tabungan Simasa yang tidak dicatat pada pembukuan BUKP dan penghimpunan deposito yang juga tidak tercatat pada sistem pem-

bukuan BUKP. “Tak hanya itu, penyalahgunaan pengelolaan kredit yang berupa tidak menyetorkan angsuran maupun pelunasan, mengambil jaminan kre-

dit, ikut menggunakan uang pencairan kredit dan ikut memberikan kredit yang tidak tercatat pada sistem pembukuan BUKP. * **Bersambung hal 7 kol 3**



Tersangka dibawa ke Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta di Gunungkidul.

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● NOVEMBER 2023, kampung kami mengadakan pertandingan kasti bagi ibu-ibu. Satu regu bergantian memukul bola, tidak ada satupun yang mengenai bola. Ada yang terjatuh, ada yang lari kencang tidak bisa mengerem, dan akhirnya keluar arena pertandingan. Ibu-ibu tetap ceria. “Mengingat masa muda,” kata mereka. (Witahari, Pandanan Sumberejo, Semin Gunungkidul 55854)-f

Analisis Ancaman Serius Pemilu

Dr Yudi Prayudi



KEBOCORAN data adalah peristiwa yang mengakibatkan terungkapnya data kredensial atau informasi yang sifatnya rahasia, sensitif, atau dilindungi kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk mengetahui/memilikinya. Dalam sudut pandang lain, kebocoran data adalah sebuah kondisi tereksposnya informasi yang sifatnya sensitif, rahasia dan dilindungi. Risiko kebocoran data dapat terjadi pada siapapun, baik individu, perusahaan, sekolah ataupun institusi pemerintahan.

Sepanjang 2023, berita tentang kebocoran data hampir selalu muncul pada setiap bulan dengan berbagai kasus. Mulai data passport, data nasabah bank, data peserta BPJS, data dukcapil. Kasus terakhir adalah data pemilih untuk Pemilu 2024. Kebocoran data pemilih tentunya sangat mengagetkan semua pihak karena justru terekspos melalui forum jual beli data serta beredar ditengah munculnya keraguan akan netralitas penyelenggara, pengawas dan penegak hukum pemilu itu sendiri.

Kebocoran data pemilih ini berdampak pada kepercayaan publik terhadap keamanan dan kerahasiaan suara mereka. Kebocoran data pemilih akan berdampak pada integritas pemilu itu sendiri. Kebocoran data pemilih adalah ancaman * **Bersambung hal 7 kol 1**